

ABSTRAK

Permohonan Cerai Talak merupakan bentuk pengajuan gugatan cerai yang dimohonkan seorang laki-laki/suami beragama Islam sebagai Pemohon dengan maksud akan menceraikan istrinya di Pengadilan Agama, Sedangkan mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang atau lainnya

Dengan mendasari pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2) ayat 241, dan pada ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan kewajiban yang diberikan suami sebagai akibat cerai talak, dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur tentang kapan dan bagaimana mekanisme /tata cara pelaksanaan putusan pemberian mut'ah kepada istri, setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam praktek hakim dalam putusannya mengukuhkan kepada suami untuk memberikan mut'ah maka penyerahannya dilaksanakan pada saat sidang penyaksian ikrar talak.

Apabila saat sidang penyaksian ikrar talak suami belum mampu memberikan mut'ah sesuai ketentuan pasal 70 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sidang ditunda hingga tenggang waktu enam bulan, akan tetapi jika sampai enam bulan suami tidak mengucapkan ikrar talak makagugurlah penetapan tersebut, sehingga tidak tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian pasal tersebut dapat dipergunakan suami dengan berbagai alasannya untuk menghindari pembayaran mut'ah, sehingga tidak ada perlindungan bagi istri untuk mendapatkan hak mut'ah, untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap istri untuk mendapat hak mut'ah, dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya putusan tentang pemberian mut'ah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris kemudian pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner kepada pihak pemohon/suami maupun termohon/istri yang berperkara di Pengadilan Agama Pati sedangkan pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melindungi hak-hak istri khususnya untuk mendapatkan hak mut'ah dalam perkara permohonan cerai talak maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci : Cerai Talak, Rekonstruksi Mut'ah

ABSTRACT

Application for Divorce is a form of filing a divorce suit filed by an Islamic husband / husband as the Applicant with the intention of divorcing his wife in the Religious Court, while mut'ah is the exemption of ex-husband to his wife, who is being fined in the form of something or money or other

Based on the word of Allah Almighty in the letter of Al Baqarah (2) verse 241, and in the provisions of Article 149 letter a, Article 158 Compilation of Islamic Law, mut'ah is an obligation granted by the husband as a result of divorce, in the absence of legal regulation which regulates when and how the mechanism / procedure for executing a mutually exclusive award to the wife, following the existence of the Supreme Court Rule No. 3 of 2017 on Guidelines for Judging the Matter of Law Offices, in practice the judge in her decision sentenced her husband to give ' ah then the submission was made at the hearing of the solemn declaration.

If at the hearing of the husband's solemn vows he has not been able to make the vows in accordance with Article 70 of Article 6 of the Republic of Indonesia Number 7 of 1989 Regarding Religious Justice, the trial is postponed to a period of six months, but for up to six months the husband has not spoken then the ruling falls apart, so that it does not achieve the principles of simple justice, speed and lightness. Thus the case can be used by the husband for various reasons to avoid the payment of mutagah, so that there is no protection for the wife to obtain mut mutah, so the purpose of this study is to know the extent of the legal protection of the wife to obtain mutah rights , and the factors that led to the inability to make the decision on the granting of mutations.

The approach used was Empirical Jurisprudence and then data extraction was conducted using interview guide and questionnaire to the applicant / husband or the applicant / wife concerned in the Court of Religious Affairs while the data processing was presented in descriptive form of analysis.

The results of this study indicate that in order to protect the rights of the wife in particular to obtain mutually exclusive rights in the matter of divorce application it is necessary to reconstruct the provisions of Article 70 of the Republic of Indonesia No. 7: 1989 of Religious Justice as amended by Republic of Indonesia Number 3 of 2006 on amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Justice and second amendment to Republic of Indonesia Law No. 50 of 2009 on second amendment to Law No. 7 of 1989 on Religious Justice.

Keyword : Divorced Divorce, Mut'ah Reconstruction